



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Hotel

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pajak Hotel.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Menguasai Komputer.Mengetahui Standar Pelayanan Publik.Memahami Dengan Baik Prosedur Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Hotel.Disiplin Dan Bertanggungjawab.Menguasai Tentang Peraturan Pajak.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">Bupati.Kepala BAPENDA.Petugas Pelayanan.Wajib Pajak.	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Dokumen pendukung pengangsuran pajak.Komputer SetJaringan Internet.Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
			Kepala BAPENDA	Bupati	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala BPKD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.				rekening koran perusahaan dan SPTPD.	14 hari	rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir dan SPTPD.	
2.	BAPENDA melakukan penelitian terhadap dokumen sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian persetujuan.				rekening koran perusahaan dan SPTPD.	14 hari	Meneliti rekening koran perusahaan selama 3 bulan terakhir dan SPTPD.	
3.	Bupati dapat memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima Surat Permohonan.				Surat Permohonan.	90 hari	Bupati memberikan persetujuan.	
	Jumlah Waktu					118 hari		